



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE., MSA.**

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. RUSDY MASTURA**

Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2023

PIHAK KEDUA,

H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA,

RICHARD ARNALDO, SE., MSA.

NIP. 19821123 200604 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	- Indeks reformasi Birokrasi	- 64
2	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	- Kontribusi PDRB sektor perdagangan	- 6.90%
	- Meningkatkan kinerja Sektor Perdagangan	- Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	- 5.849,88 Juta USD
		- Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	- 4-6 %
		- Inflasi pangan berkejang	- 3-5%
3	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	- 12.00%
	- Meningkatkan kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	- Nilai ekspor produksi industri non-migas	- 1.646 Juta USD
		- Jumlah tenaga kerja di sektor industri	- 68.000 Jiwa
		- Cakupan bina pelaku IKM	- 11-14%

Program

Anggaran

Keterangan

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	= Rp.	18,676,956,138	APBD
2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp.	309,763,100	APBD
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	= Rp.	170,080,450	APBD
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	= Rp.	3,009,921,500	APBD
5.	Program Pengembangan Ekspor	= Rp.	643,876,800	APBD
6.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp.	2,073,894,383	APBD
7.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	= Rp.	280,974,900	APBD
8.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp.	3,371,690,698	APBD
9.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	= Rp.	274,429,950	APBD
10.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	= Rp.	279,049,700	APBD
11.	Program Perdagangan Dalam Negeri	= Rp.	484,905,000	APBN
12.	Program Perdagangan Luar Negeri	= Rp.	239,064,000	APBN
13.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	= Rp.	1,346,610,000	APBN

Palu, 7 Februari 2023

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH


H. RUSDI MASTURA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


RICHARD ARNALDO, SE., MSA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19821123 200604 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., M.SA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., M.SA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE
NIP. 19661028 199203 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatkan Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan	- Nilai Sakip	- B Indeks
		- IKM	- B Indeks Kepuasan Masyarakat
		- Presentase Realisasi Anggaran	- 90%

Program

1. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi

Anggaran

= Rp. 16,447,150,467

Keterangan

APBD



Pala, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA
SEKERTARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

IB. MAINTA JOTOLEMBAHSE
Nip. 19661028 199203 2 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PELAKSANAAN TEKNIS
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang	- IKM	B Indeks - Kepuasan Masyarakat
		- Presentase Realisasi Anggaran	- 90%
	- Terlaksananya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	- Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	- 90%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 404,633,815	APBD
2 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 1,454,830,150	APBD

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
SULAWESI TENGAH
RICHARD ALYALDO, SE., MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PELAKSANAAN TEKNIS
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN

DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 19691109 199903 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala UPTD PSMB

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., M.SA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., M.SA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PSMB
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM
NIP. 19780420 201001 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

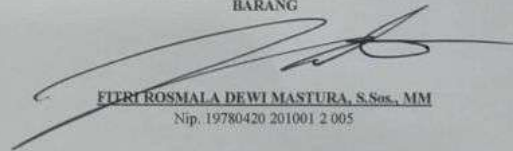
No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatkan Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang	- IKM	- B Indeks Kepuasan Masyarakat
		- Presentase Realisasi Anggaran	- 90%
	- Terlaksananya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	- Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi	- 3%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 827,499,286	APBD
2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 619,064,233	APBD

Palu, 13 Februari 2023



PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG


FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM
Nip. 19780420 201001 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAPIT TOLLA, SE
Jabatan : Plt. Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., M.SA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., M.SA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
PLT. KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN
DAERAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

HAPIT TOLLA, SE
NIP. 19731121 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatkan Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang	- IKM	- B Indeks Kepuasan Masyarakat
		- Presentase Realisasi Anggaran	- 90%
	- Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Persentase Layanan IKM	- 100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 997,672,570	APBD
2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1,003,341,698	APBD


 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 RICHARDUS RUSALIMSE, MPA
 NIP. 19821123 2006041 006

Palu, 13 Februari 2023
 PIHAK PERTAMA
 PLT. KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
 PRODUK INDUSTRI PANGAN KERAJINAN
 DAERAH

 RAPTI TOLLA SE
 NIP. 19731121 200701 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRWANSYA, SH, MH**
Jabatan : Kepala Bidang Fasilitas Dan Informasi Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., M.SA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., M.SA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG FASILITASI DAN
INFORMASI INDUSTRI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

IRWANSYA, SH, MH
NIP. 19650622 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

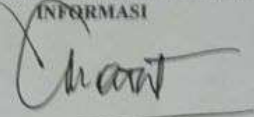
No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	- 100%
	Keg Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	- Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana	- 1 Dokumen
2	- Tercapainya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	- Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas	- 64%
	Keg Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	- Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	- Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	- 1 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1,378,156,950	APBD
Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 1,378,156,950	
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	= Rp. 429,691,150	
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	= Rp. 822,999,700	
Sub.keg Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	= Rp. 125,466,100	

2.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	= Rp.	279,049,700	APBD
Keg	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	= Rp.	279,049,700	
Sub.keg	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	= Rp.	64866000	
Sub.keg	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	= Rp.	113982500	
Sub.keg	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	= Rp.	100201200	


PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
RICHARD ARNALDO, SE., MSA
 NIP. 19821123 200604 1 006

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG FASILITASI DAN
INFORMASI

IRWANSYA, SH, MH
 Nip. 19650622 199603 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., M.SA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., M.SA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	- 100%
Keg	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- 1 Dokumen
Sub.keg	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	- 3 Dokumen
Sub.keg	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- 2 Dokumen
Sub.keg	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- 1 Dokumen
2	Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis	- 100%
Keg	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	- 1 Laporan
Sub.keg	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar, dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	- 1 Dokumen
Sub.keg	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	- 1 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 990,192,050	APBD
Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp.	
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	= Rp. 53,646,000	
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	= Rp. 239,941,150	
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	= Rp. 696,604,900	

2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	= Rp.	274,429,950	APBD
Keg	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	= Rp.	274,429,950	
Sub.keg	Facilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	= Rp.	125351950	
Sub.keg	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	= Rp.	149078000	

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
SULAWESI TENGGAH
RICHARD ANANDU SE, MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI
MIRA YULIASTUTI, ST.MP
Nip.19730831 200012 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAJAR SETIAWAN, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., M.SA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., M.SA
NIP. 19821123-200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR
NEGERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

FAJAR SETIAWAN, SE, MM
NIP. 19830304 200112 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


No	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	- Persentase penerbitan SKA	- 100%
	Keg. Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah	- Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi	- 1 Laporan
	Sub.Keg. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	- Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	- 1 Dokumen
2	- Terwujudnya Pengembangan Ekspor	- Nilai ekspor	- 9634,00 Juta USD
	Keg. Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	- Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam	- 1 Laporan
	Sub.Keg. Terlaksananya Pameran Dagang Internasional/Nasional	- Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	- 3 Pelaku Usaha
	Sub.Keg. Terlaksananya Pameran Dagang Lokal	- Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi	- 24 Pelaku Usaha
	Sub.Keg. Terlaksananya Peningkatan Citra Produk Ekspor	- Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang	- 2 Produk
	Sub.Keg. Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	- Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	- 10 Pelaku Usaha

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 236,954,000	APBD
Keg. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi	= Rp. 236,954,000	
Sub.Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	= Rp. 236,934,000	
2. Program Pengembangan Ekspor	= Rp. 643,876,800	APBD
Keg. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui	= Rp. 643,876,800	
Sub.Keg. Pameran Dagang Internasional/Nasional	= Rp. 117,510,900	
Sub.Keg. Pameran Dagang Lokal	= Rp. 311,450,000	
Sub.Keg. Peningkatan Citra Produk Ekspor	= Rp. 33,541,500	
Sub.Keg. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	= Rp. 161,374,400	

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

RICHARD ARNALDO, SE, MSA
 NIP. 19621123 20061006

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR
NEGERI

FAJAR SETIAWAN, SE, MM
 Nip. 19830304 200112 1 604

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM**
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO SE., M.SA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO SE., M.SA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM
NEGRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	- Persentase rekomendasi SIUP B2/MB-Gol B /MB Gol. C	- 100%
	Keg. Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar,	- Jumlah Dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer	- 1 Dokumen
	Sub.keg. Terlaksananya Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan	- 1 Dokumen
2	- Terlaksananya Sarana Distribusi Perdagangan	- Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	- 100%
	Keg. Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	- Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan	- 1 Dokumen
	Sub.keg. Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi	- 1 Laporan
	Sub.keg. Terlaksananya Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	- Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang	- 2 Orang
3	- Tercapai Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	- 100%
	Keg. Terlaksananya Kegiatan penjaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	- Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	- 1 Dokumen
	Sub.keg. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan	- 4 Laporan
	Sub.keg. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting	- 4 Laporan
	Keg. Terlaksananya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	- Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	- 1 Dokumen
	Sub.keg. Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku	- Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	- 4 Laporan
	Sub.keg. Terlaksananya Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga	- 6 Laporan
	Keg. Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	- Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	- 100 %
	Sub.keg. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi	- 1 Laporan
4	- Terlaksananya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	- Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi	- 20%
	Keg. Terlaksananya Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	- 1 Laporan
	Sub.keg. Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	- Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri	- 1 Laporan
	Keg. Terlaksananya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- 25 UMKM
	Sub.keg. Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	- 1 Laporan

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 72,809,100	APBD
Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan	= Rp. 72,809,100	
Sub.keg. Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	= Rp. 72,809,100	

2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	= Rp. 170,080,450	APBD
Keg.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi	= Rp. 170,080,450	
Sub.keg	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional	= Rp. 81,132,450	
Sub.keg	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang	= Rp. 88,948,000	
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	= Rp. 3,009,921,500	APBD
Keg.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	= Rp. 150,468,350	
Sub.keg	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang	= Rp. 91,075,450	
Sub.keg	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting	= Rp. 59,392,900	
Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok	= Rp. 2,753,345,350	
Sub.keg	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	= Rp. 925,258,650	
Sub.keg	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan	= Rp. 1,828,086,700	
Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah	= Rp. 106,107,800	
Sub.keg	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk	= Rp. 106,107,800	
4.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	= Rp. 280,974,900	APBD
Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam	= Rp. 182,295,650	
Sub.keg	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	= Rp. 182,295,650	
Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	= Rp. 98,679,250	
Sub.keg	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	= Rp. 98,679,250	

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
SULAWESI TENGGAH
RICHARD ARNALDO, SE., MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM
NEGERI



DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
Nip. 19770405 200212 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN. M, ST, MM**
Jabatan : Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HAPIT TOLLA, SE**
Jabatan : Plt. Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
PLT.KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



HAPIT TOLLA, SE
NIP. 19731121 200701 1 009

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK
PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

RIDWAN. M, ST, MM
NIP. 19680721 201112 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	- 959 IKM
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- 2 Dokumen

Kegiatan
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Keg. 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta
Masyarakat

Anggaran

Rp662,537,158

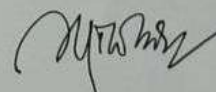
Keterangan

Palu, 13 Februari

PIHAK KEDUA
Plt. Kepala UPTD pengembangan
produk industri pangan dan
kerajinan daerah

HAPIT TOLLA, SE
Nip. 19731121 200701 1 009

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah



RIDWAN, M. S. T. M M
Nip. 19680721 201112 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VERADIAN SAPHIRE,SP,MM**
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**
Jabatan : Plt. Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

PIHAK KEDUA,
PLT.KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



HAPIT TOLLA,SE
NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK
PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

VERADIAN SAPHIRE,SP,MM
NIP. 19750319 199603 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	- 959 IKM
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- 2 Dokumen

Kegiatan
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Sub Keg. 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta
Masyarakat

Anggaran

Rp340,804,540

Keterangan

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA
Plt. Kepala UPTD pengembangan
produk industri pangan dan
kebijakan daerah dinas


HARIT TOLLA, SE
Nip. 19731121 200701 1 009

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan


VERADIAN SAPPHIRE, SP, MM
Nip. 19750319 199603 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAPIT TOLLA, SE**
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HAPIT TOLLA, SE**
Jabatan : PLT. Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

PIHAK KEDUA,
PLT.KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



HAPIT TOLLA, SE
NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA KEPALA UPTD
PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN
DAN KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

HAPIT TOLLA, SE
NIP. 19731121 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Tertindakannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Keuangan	- 1 Dokumen
Sub Keg.	Tertindakannya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- 1 Dokumen
Keg.	Tertindakannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	- 1 Laporan
Sub Keg.	Tertindakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- 2 Paket
Sub Keg.	Tertindakannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- 2 Paket
Sub Keg.	Tertindakannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- 1 Paket
Sub Keg.	Tertindakannya Fasilitas kunjungan tamu	- Jumlah Laporan Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	- 1 Laporan
Sub Keg.	Tertindakannya Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	- 1 Laporan
Keg.	Tertindakannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- 1 laporan
Sub Keg.	Tertindakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 2 Laporan
Sub Keg.	Tertindakannya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1 Laporan
Keg.	Tertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- 1 laporan
Sub Keg.	Tertindakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	- 8 Unit
Sub Keg.	Tertindakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 35 Unit

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp635,160,000	
Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4,140,000	
Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp47,010,100	
Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp12,286,500	
Sub Keg.	Fasilitas kunjungan tamu	Rp11,640,000	
Sub Keg.	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp14,700,000	
Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp164,635,970	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1,200,000	
Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp75,000,000	
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp28,900,000	

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEMUKA
PLT. Kepala UPTD Pengembangan
Produk Industri Pangan Dan
Kerajinan Daerah
DINAS PERINDUSTRIAN
DAERAH BANGGALA
HAPTI TOLLA, SE
Nip. 19731121 200701 1 009

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan
Daerah

HAPTI TOLLA, SE
Nip. 19731121 200701 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN N.ALISE**
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga Dan Penegakkan Hukum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PELAKSANAAN
TEKNIS PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109-199903 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGAWASAN BARANG DAN
JASA, TERTIB, NIAGA DAN PENEGAKKAN
HUKUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

RIDWAN N.ALISE
NIP. 19780531 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah laporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	- 2 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	- Jumlah Kasus yang Ditangani	- 4 Kasus

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Keg. 1 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Rp163,707,350	
2 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Rp163,707,800	

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis
Pengawasan Dan Perlindungan
Konsumen

DEDDY SUARMAN, SE, MM
Nip. 198911021990031006

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengawasan ~~Barang~~ Dan Jasa, Tertib, Niaga
Dan Penegakkan Hukum

RIDWAN NALLSE
Nip. 197805312002121003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PURWATA, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PELAKSANAAN
TEKNIS PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PEMBERDAYAAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PURWATA, SE
NIP. 19710610 199103 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Tertaksananya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen	- 1 Laporan
Sub Keg.	Tertaksananya Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	- Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	- 4 BPSK
Sub Keg.	Tertaksananya Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	- Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	- 1 LPKSM
Sub Keg.	Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	- Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	- 16 Pengaduan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Sub Keg. 1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
1. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Rp905,036,100	
2. Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Rp120,415,000	
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Rp101,963,900	

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Pelaksanaan Teknik
Pengawasan Dan Perlindungan
Konsumen

DEDDY SUARMAN, SE, MM
Nip. 196911091499031006

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

PURWATA SE
Nip. 197106101991031005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDRIYANI, SE**
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PELAKSANAAN
TEKNIS PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA UPTD PELAKSANAAN
TEKNIS PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


INDRIYANI, SE
NIP. 19711018 199202 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Keg.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Keg.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Laporan
Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-
Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp251,160,000	
Sub Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp32,434,240	
Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp1,583,800	
Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp15,870,000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp66,968,875
Sub Keg.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1,500,000
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp2,356,900
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp32,760,000

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis
Pengawasan Dan Perlindungan



DEDDY SUKSESAN, SE, MM
Nip. 196911091999031006

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan
Konsumen

INDRIYANI, SE
Nip. 197110181992022006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LEVIANA MANGOPO, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Kalibrasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI
MUTU BARANG PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM
NIP. 19780420 201001 2 005

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KALIBRASI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LEVIANA MANGOPO, ST
NIP. 19851031 201101 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Indeks Kepuasan Masyarakat	- 77 Indeks
		- Indeks Kinerja PMMB	- 3 Indeks
Sub Keg.	Terlaksananya Pengembangan Layanan Sertifikasi	- Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	- 2 Sertifikat
Sub Keg.	Terlaksananya Pengembangan Layanan Kalibrasi	- Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	- 150 Sertifikat

Kegiatan
 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi
 Mutu Produk di Seluruh Daerah
 Kabupaten/Kota

Anggaran

Keterangan

Sub Keg. 1 Pengembangan Layanan Sertifikasi
 2 Pengembangan Layanan Kalibrasi

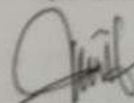
Rp123.142.400
 Rp180.507.311

Kepala UPT Pengujian Sertifikasi
 Mutu Barang

ETTRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM
 Nip. 19780420 201501 2 003

Pala, 13 Februari 2023

PIRAK PETAMA
 Kepala Seksi Kalibrasi



LEVISNA MANGGOLA WI
 Nip. 19850331 201301 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIDYAWATI, S.Pt**
Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI
MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM
NIP. 19780420 201001 2 005


WIDYAWATI, S.Pt
NIP. 19750607 200112 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	
(1)	(2)	(3)		(4)	
Keg.	Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	77 Indeks
		-	Indeks Kinerja PSMB	-	3 Indeks
Sub Keg.	Terlaksananya Verifikasi Mutu Produk	-	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	-	3 Komoditi
Sub Keg.	Terlaksananya Pengembangan Layanan Pengujian	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	-	1 Dokumen

Kegiatan
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran

Keterangan

Sub Keg. 1 Verifikasi Mutu Produk
2 Pengembangan Layanan Pengujian

Rp140,645,300
Rp174,769,222

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Soc., MM
Nip. 19780420 201001 2 003

WIDYAWATI, S.Pi
Nip. 19750607 200112 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PETRUS KRISTOPORUS, S.KOM
Jabatan : Plt. Kepala Tata Usaha UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI
MUTU BARANG PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



FITRI ROSMALA DEWI MASTURA, S.Sos., MM
NIP. 19780420 201001 2 005

**PIHAK PERTAMA,
PLT.KEPALA TATA USAHA UPT
PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PETRUS KRISTOPORUS, S.KOM
NIP. 19721214 201408 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Realisasi Anggaran	- 90%
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- 1 Dokumen
Keg.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	- 1 laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- 1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- 1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- 1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Laporan
Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1 Laporan
Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	- Jumlah Kendaraan Pengeran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	- 4 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- 4 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 7 Unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp329,760,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3,237,250	
Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp51,028,190	
Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp27,055,150	
Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp83,036,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp12,348,000	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp168,737,496	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp50,363,200	

Pencabutan Barang Modal Dasar
Pemerintah Union Pemerintahan Daerah

Sub Kvg.	Pencabutan dan Pencabutan, Biaya Pencabutan dan Pabrik Kenderaan Perawatan dan lain-lain Kenderaan (Hati Jalan)	Rp4,182,000
Sub Kvg.	Pencabutan dan Pencabutan, Biaya Pencabutan, Pabrik dan Perawatan Kenderaan Unit Operasional dan Lain-lain	Rp47,950,000
Sub Kvg.	Pencabutan Perawatan dan Mesin Lainnya	Rp49,800,000

PH. SR. KEDUA
Kepala UPT Pengujian Sertifikasi
Moto Darang

ELDI ROSMALA DEWI MASTURA, S.KOM, MAI
Nip. 19780430 201601 7003

Pala, 13 Februari 2023

PHAK FETASIA

PH. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Pengujian Sertifikasi Moto Darang

PETRUS KUMTORUBU, S.KOM
Nip. 19721214 201408 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI EKA MUSDAR, S.IP**
Jabatan : **Pt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum**

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE
NIP. 19661028 199203 2 010

**PIHAK PERTAMA,
PLT. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

ANDI EKA MUSDAR, S.IP
NIP. 19920102 201507 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen SKM	- 1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- 4 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 16 Orang
Sub Keg.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- 42 Orang
Keg.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah Laporan Penyediaan	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	- 4 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	- 4 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- 4 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	- 12 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 75 Laporan
Keg.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- 15 Unit
Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	- 13 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 12 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 4 Laporan
Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
		- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	- 35 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 115 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- 1 Unit

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:		
Sub Keg.	1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp28,650,000	
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp146,936,000	
	3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp6,600,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Keg.	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp12,911,296	
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp181,421,759	
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp60,369,800	
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp50,400,000	
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp222,995,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Keg.	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp297,798,369	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Keg.	1 Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp300,000	
Sub Keg.	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp521,940,400	
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Keg.	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp211,984,300	
Sub Keg.	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp126,600,000	
Sub Keg.	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp15,000,000	

Palu, 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan


HJ. MAHNIATI MOLEMBALISE

Nip. 19661028 199203 2 010

PIHAK PETAMA
Pit. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum



ANDI EKA MUSDAR, S.IP
Nip. 19920102 201507 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURDIANA, SE, MM**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE
NIP. 19661028 199203 2 010

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASSET DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NURDIANA, SE, MM
NIP. 19731202 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Tertindakannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	1 Dokumen
Sub Keg.	Tertindakannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 orang/bulan
Sub Keg.	Tertindakannya Penyediaan administrasi/pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen
Sub Keg.	Tertindakannya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen
Sub Keg.	Tertindakannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
Sub Keg.	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan
Sub Keg.	Tertindakannya Pengolahan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen
Sub Keg.	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan
Sub Keg.	Tertindakannya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	1 Dokumen
Keg.	Tertindakannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	14 Laporan
Sub Keg.	Tertindakannya Pengurusan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengurusan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen
Sub Keg.	Tertindakannya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Sub Keg.	Tertindakannya Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
Sub Keg.	Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Tertindakannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Keg. 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp11.504.639.643	
Sub Keg. 2. Penyediaan administrasi/pelaksanaan tugas ASN	Rp1.239.000.000	
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan Verifikasi Keuangan SKPD	Rp321.030.000	
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp72.053.800	
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp53.257.330	
6. Pengolahan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp92.009.100	
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp67.037.800	
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Rp36.060.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Keg. 1. Pengurusan Barang Milik Daerah SKPD	Rp93.110.000	
2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp65.177.080	
3. Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp31.624.950	
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp63.214.000	



Pala, 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA
 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset

[Signature]
 NURDIANA, SE, MM
 Nip. 19731202 2002127 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROY EDWARD KUMAAT, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2023

**PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH, SE
NIP. 19661028 199203 2 010

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

ROY EDWARD KUMAAT, SE
NIP. 19820321 200904 1 004

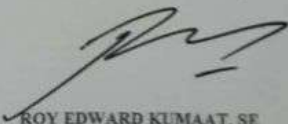
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja - 1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - 1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - 1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - 1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1 Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Sub Keg. 1		
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp561,738,000	
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp12,825,000	
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp7,350,000	
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp5,725,100	
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp3,750,200	
6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp124,279,700	

Palu, 13 Februari 2023


PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
HI MAHNIKA JOTOLEMBAH, SE
 Nip. 19661028 199203 2 010

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

ROY EDWARD KUMAAT, SE
 Nip. 19820321 200904 1 004